

sa'ah".

Bagaimana hubungannya dengan pengaplikasian hukum-hukum al-Qur'an ?

Bukan tidak berusaha untuk memperjuangkannya, tapi kenyataan yang ada seperti ini. Namun kita lihat sendiri bahwa sekarang ini, hukum-hukum keluarga seperti perkawinan, dsb. sudah diserahkan pada Islam. Kemudian, peradilan agama juga sudah mulai diserahkan pada Islam.

Kalau pada masalah politik, bagaimana sebetulnya sikap ulama ?

Sebagai warga negara, apakah ulama, pengusaha, santri, dsb. itu punya hak untuk terjun pada politik. Ya wajar saja karena negara ini bukan milik satu golongan saja. Dan, di dalam semua kegiatan politik itu kita harus bertekad untuk dakwah (amar ma'ruf nahyi munkar). Hal itu dilakukan, baik di Golkar, di PPP atau yang lainnya.

Lalu, kalau dilihat ulama itu ternyata terbagi dua, ada yang pro-pemerintah dan ada yang menjadi oposan, bagaimana menurut Kyai ?

Bukan begitu pemahamannya. Tetapi, ada ulama yang beramar ma'ruf nahyi munkar pada pemerintah dan ada ulama yang beramar ma'ruf nahyi munkar pada kelas bawah.

Namun, dari gelagatnya, banyak ulama yang memaksakan penafsiran Al-Qur'an dan Sunnah Rasul yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintah.

Memang itu ada, tetapi hanya sebagian saja. Tetapi itu sebetulnya bukan merubah nashnya, itu hanya merubah penafsirannya.

■ MTR

Membaca Peran Ulama Di Negara Kita

Kenyataan bahwa alim-ulama agak terpinggirkan dari pentas politik, itu sudah tidak dipungkiri lagi. Kini, ulama tidak lagi dipandang sebagai *spiritual and social power* (kekuatan spiritual dan sosial). Kedudukan mereka yang dulu disegani, dikagumi, bahkan ditakuti, dalam politik sekaligus sebagai pengayom umat, sudah tidak berlaku lagi. Bahkan ada anggapan bahwa ulama itu hanya sebagai penerjemah pihak umara saja. Sebelum mengungkap dan menganalisis segala permasalahannya, mari kita mulai dari mengenali siapakah ulama itu dan bagaimanakah asal kedudukannya dulu.

Ulama dan Asal Kedudukannya di Indonesia

Asal arti *ulama* adalah orang-orang yang berilmu (jamak) dari bentuk mufrad (tunggal)-nya *alim*. Maka, pada mulanya, setiap orang yang berilmu adalah ulama.

Tetapi dalam praktiknya, masyarakat Indonesia lebih banyak mengidentifikasi ulama sebagai seseorang yang ahli ilmu agama.

Padahal, menurut A. Mansyur Suryanegara, Dosen Sejarah Universitas Padjadjaran dan IAIN SGD Bandung, para ulama sendiri tidak menempatkan diri

seperti itu. Para ulama itulah yang mempunyai respek terhadap kemerdekaan bangsa dan berusaha terus-menerus "mengompori" masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim itu untuk berjuang melawan imperialis Katolik Portugis dan imperialis Protestan Belanda.

Bahkan, sampai pada masalah-masalah teknis seperti bendera pun ada keterlibatan ulama di dalamnya. A. Mansyur menyebutkan bahwa berdasarkan hadits "*Innallaha zawaaliyal ardha, Masyariqahaa wa maghribahaa Wa a'thaanii kanzaini; ahmara wal abyadha*" (Allah memperlihatkan kepadaku

[Rasulullah] dunia. Kulihat Timur dan baratnya. aku diberi kekayaan warna merah dan putih)—HR. Imam Muslim, para ulama berusaha memasyarakatkan bendera merah putih lewat pembangunan rumah bagian atap dan dalam Muharraman.

Selanjutnya, Mansyur menyitir pendapat Sartono Kartodirjo yang memberikan informasi sejarahnya bahwa peranan Pesantren (yang di dalamnya para Ulama bergerak — *red.*) di Jawa pada abad ke-19 yang berjumlah sekitar 300 buah



pesantren, memegang peranan penting dalam pengembangan nasionalisme. Dan pada waktu pendudukan Jepang, di bidang pembentukan militer pribumi, Tentara Pembela Tanah Air, 100 batalyon, para Ulama dan Guru agama diangkat sebagai dan Yon. Hal ini berpengaruh besar terhadap pembentukan TNI pada saat Proklamasi. Demikian pula pada sidang BPUPKI, umat Islam tidak dinilai sebagai kekuatan kecil.

Puncaknya, para ulama juga adalah kelompok inti perumus awal dari Pancasila dan UUD 1945, mereka adalah Wahid Hasyim (NU), Ki Bagus Hadikusumo dan Kasman Singodimedjo (Muhammadiyah), dan Mohammad Hatta serta Mohammad Teuku Hassan (Wakil Sumatera).

Perubahan Peran Ulama

Kini, setelah maraknya orang-orang berpolitik praktis, adanya eksekutif, dll. kedudukan ulama mulai terpinggirkan. Terhadap pergeseran peran ulama ini, Menteri Agama, **Dr. Tarmiczi Taher**, melihat sebagai satu hal yang wajar-wajar saja. Karena, menurutnya, zaman itu sudah berubah, dan perubahan itu menuntut peran pihak-pihak lain. Maka secara otomatis bermunculan pelaku-pelaku yang menempati posisi strategis. Maka kini, menurutnya, para ulama berperan dalam mempersiapkan kader-kader beragama.

Dari pendapatnya itulah, maka Menteri merasa khawatir ketika para ulama banyak yang meninggalkan lahannya (umatnya — *red.*) dan turun ke politik praktis.

Dalam hal ini, **Dr. Amin Abdullah**, Dosen Pasca sarjana IAIN Kalijaga Yogyakarta yang lulusan Middle East Technical University (METU), Ankara, Turki itu, pun mengakui keterpinggiran ulama itu. Tetapi, menurutnya, keterpinggiran itu bukan merupakan satu hal yang tercela. Bahkan, dia katakan hal itu sebagai prestasi, yaitu berpartisipasi dalam membina umat

Islam sehingga mempunyai jiwa dan mental agama.

Berbeda dengan yang lainnya, justru **KH. Totoh Abdul Fatah**, Ketua MUI Jawa Barat, menyatakan bahwa posisi ulama itu justru dipentingkan oleh pemerintah, bahkan seringkali diajak kerja sama.

Tetapi kerja sama itu sendiri menurut **Dr. Djoko Suryo**, mantan Dekan Fak. Sastra UGM, Ahli Sejarah lulusan Monash University, Melbourne, Australia, adalah suatu kooptasi Pemerintah agar ulama bisa dipegang, bisa dirangkul untuk tujuan-tujuan politik. Karena, menurutnya, pemerintah menyadari bahwa wadah para ulama seperti MUI itu ada komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan kemasyarakatan, kenegaraan, pengembangan dan pemantapan masyarakat beragama. Disamping itu, para ulama juga berkepentingan dalam rangka pemantapan falsafah negara di mana agama sangat mendasar dan sangat sentral.

Dari sikap sebagian ulama yang seperti itu keadaannya, timbullah perpecahan ulama.

Terpecahnya Para Ulama

Secara alamiah, perpecahan ini memang telah terjadi, dan walaupun banyak digunjingkan orang, namun hal ini pun diasumsikan sebagai satu hal yang lumrah. Hal itu terutama dialamatkan pada perpecahan di bidang *khilafiyah* (baca: perbedaan paham fiqih). Meskipun jika mengarah pada pertengkar antar ulama (biasanya diikuti oleh pertengkar antar lembaga-lembaga keislaman) hal itu sudah tidak baik lagi.

Yang menjadi sorotan di sini, dan yang banyak dianggap sebagai sesuatu yang merugikan umat secara politis adalah adanya perpecahan ulama dalam peranan politiknya.

Jelasnya, kini para ulama telah terbagi sekurang-kurangnya pada tiga golongan. *Pertama, ulama resmi* (Djoko Suryo

menyebutnya sebagai *Ulama Birokrat*), ulama yang berpihak pada penguasa sehingga apa saja yang menjadi keputusan Pemerintah, para ulama tinggal mendukung dengan melegitimasi. Alhasil, mereka itu *Pro-Pemerintah*. *Kedua, Ulama Independen* (Djoko Suryo menyebutnya sebagai *Ulama Bebas*), ulama yang berpihak pada idealisme keislaman, sehingga seolah-olah mereka itu *Kontra-Pemerintah*. *Ketiga, Ulama Escapis*, ulama yang tidak berpihak ke mana-mana dalam politik. Mereka melarikan diri dari dunia politik dan berkompensasi pada pendidikan pesantren.

Terhadap perpecahan ini, Amien Abdullah berpendapat bahwa dengan variasi yang tidak dapat diingkari ini, akan terjadi adu tawar ideologi yang merupakan keharusan sejarah. Dan, menurutnya pula, siapa yang mempunyai strategi dengan tidak mengabaikan kondisi *esensi* dan *historis* bangsa ini itulah yang akan menang.

Sedangkan menurut KH. Totoh, ulama yang kedua itu sebetulnya tidak ada di Indonesia, karena sebetulnya pihak yang kedua itu dapat dianggap sebagai penyelamat negara. Dan itu wajar saja jika sekali-kali bernada keras. Asal, katanya, kerasnya itu tidak diprogramkan. Sebab, katanya pula, Orang-orang yang berprogram untuk keras kepada Pemerintah itu sebetulnya bukan ulama, mereka hanya bisa ngaji sedikit saja.

Berbeda dengan di atas, menurut **Rijal Fadlillah, SH.**, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah yang Ketua PW GMPI Jawa Barat itu, yang bukan ulama itu adalah kelompok ulama yang hanya mengurus pesantren dan lari dari kenyataan sosio-politis umat.

Rijal mengharapkan adanya suatu peringatan, tidak mengabaikan kepentingan dan aspirasi umat. Ulama itu harus berpihak pada umat. Untuk hal ini pula, Bahkan Djoko Suryo menyarankan agar ulama birokrat tidak kehilangan ke-ulama-annya.

Dilain pihak Rijal pun berharap kepada ulama supaya harus selalu melihat konteks masalahnya. Kalau masalahnya lagi benar, ya didukung, tetapi kalau masalahnya merugikan umat ya harus berani mengkritik. "Ulama kan *waratsat al-Anbiya*, Nabi itu kan peduli pada umat" demikian katanya. ■ **M. Taufiq R**

M

enurut Dr. Djoko Suryo, pemerintah menyadari bahwa wadah para ulama seperti MUI itu ada komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan kemasyarakatan, kenegaraan, pengembangan dan pemantapan masyarakat beragama.

Disamping itu, para ulama juga berkepentingan dalam rangka pemantapan falsafah negara di mana agama sangat mendasar dan sangat sentral. Dari sikap sebagian ulama yang seperti itu keadaannya, timbullah perpecahan ulama